



# KPK Temukan Catatan Khusus Milik Haryadi

► Penyitaan dilakukan sebagai kelengkapan berkas perkara tersangka.

► Penjabat Wali Kota Jogja Sumadi menyatakan penyidik KPK membawa berkas yang berkaitan dengan kasus OTT Haryadi.

**JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menemukan catatan khusus mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, dalam penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).**

*Sunartono & Yosef Leon  
redaksi@harianjogja.com*

Catatan khusus itu didapat setelah penyidik KPK menggeledah sejumlah tempat di kompleks Balai Kota Jogja, di Timoho, Jogja, Selasa (7/6). "Pada penggeledahan dimaksud, ditemukan dan diamankan berbagai bukti, di antaranya berbagai dokumen dengan catatan khusus dari HS [Haryadi Suyuti] selaku Wali Kota untuk penerbitan izin IMB yang diduga kuat berkaitan dengan perkara ini," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Rabu (8/6).

Selain itu, KPK menggeledah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Jogja. Ali mengatakan bukti itu akan dianalisis nantinya. Penyitaan juga dilakukan sebagai kelengkapan berkas perkara tersangka. "Tim penyidik segera menganalisis dan menyita [berkas] untuk bukti-bukti tersebut guna melengkapi berkas perkara para tersangka," ujarnya.

Penggeledahan yang dilakukan tim KPK dimulai pada Selasa siang, dan rampung sekitar pukul 20.00 WIB.

### KPK Temukan...

Dua koper besar dan tas berisi dokumen ikut dibawa petugas sebagai barang bukti. Adapun proses pengeledahan berlangsung sekitar kurang lebih delapan jam yang dimulai sejak pukul 12.00 WIB. Awalnya Kantor Wali Kota Jogja yang menjadi lokasi pengeledahan pertama, kemudian petugas bergeser ke ruangan Kepala DPMPPTSP dan kemudian mengeledah kantor DPUPKP setempat.

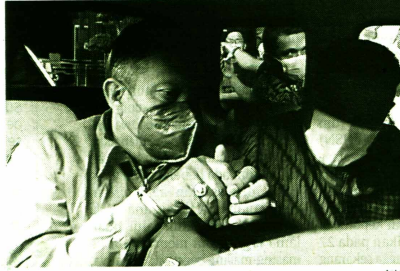
Dua koper dan tas berukuran jumbo dibawa petugas yang kemudian dimasukkan ke dalam bagasi kendaraan roda empat. Proses pengeledahan berlangsung secara tertutup dengan mendapat pengawasan dari petugas Brimobda DIY dan Sat Pol PP setempat.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Jogja periode 2017-2022 Haryadi Suyuti (HS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin apartemen Royal Kedhaton di Gedongtengen, Jogja. Selain Haryadi, KPK menetapkan tiga tersangka yakni Vice President Real Estate PT SA Tbk (Summarecon Agung), Oon Nusiho; Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogja, Nurwidhihartana; dan sekretaris pribadi merangkap Ajudan Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono. KPK juga menyita uang totalnya US\$27.258.

#### Bawa Dokumen

Penjabat Wali Kota Jogja Sumadi menyatakan penyidik membawa berkas atau dokumen yang berkaitan dengan kasus OTT yang melibatkan pejabat Pemkot Jogja beberapa hari lalu. Ia menegaskan siap bekerja sama dengan KPK ketika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk proses penyidikan.

"Intinya jelas berkas-berkas itu yang berkaitan dengan kasus kemarin yang terjadi OTT itu. Prinsipnya kami dari Pemkot bekerja sama dengan baik terhadap apa-apa



Mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti saat ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu.

yang dilakukan oleh KPK," katanya di sela-sela menghadiri pemberangkatan jemaah calon haji di kompleks Kepatihan, Rabu.

Sumadi mengaku belum mengecek secara detail berkas apa saja yang dibawa KPK dalam pengeledahan tersebut. Namun sebagian besar merupakan dokumen berkaitan dengan perizinan. "Saya belum tahu detailnya tetapi yang berkaitan dengan proses kemarin dalam hal ini apartemen [suap IMB apartemen] dan beberapa perizinan, saya belum lihat," ujarnya.

Ia menambahkan pengeledahan itu merupakan rangkaian dari kasus OTT sebelumnya. Termasuk berkaitan dengan berkas perizinan yang diterbitkan semasa Wali Kota periode 2017-2022. "Pokoknya ada beberapa berkas mungkin rangkaian termasuk perizinan sebelum kejadian [OTT] kemarin tetapi masih di bawah kewenangan beliau [Haryadi Suyuti]," ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Asisten Sekda DIY ini tidak menampik bahwa KPK turut membawa sejumlah dokumen perizinan hotel yang diterbitkan Haryadi. "Kelihatannya itu [dokumen izin hotel], tetapi banyak saya belum lihat satu per satu. Mungkin iya [IMB hotel] tetapi rangkaianannya

berkaitan dengan izin yang masih menjadi kewenangan beliau [Haryadi] dengan Dinas Perizinan itu masih menjadi kewenangan beliau. Kelihatannya tidak satu lokasi, yang paling banyak [berkas dibawa] dari perizinan," katanya.

Sumadi menyatakan sejumlah ruangan di lingkungan Pemkot Jogja yang disegel oleh penyidik telah dibuka mulai dari ruang Wali Kota Jogja, Dinas Perizinan, Dinas PU, dan rumah dinas Wali Kota.

"Sudah dilepas [segelnya oleh KPK], saya belum lihat tetapi tadi malam [Selasa] katanya sudah dilepas segelnya, artinya sudah klar kan. Karena sebenarnya di ruangan saya [ruang Wali Kota] sudah tidak terlalu banyak data," katanya.

Dengan dibukanya ruang Wali Kota maka Sumadi pun sudah bisa menempati ruangan tersebut karena ia selaku Penjabat Wali Kota Jogja. Selama disegel ia menempati ruangan Wakil Wali Kota Jogja.

"Ora ning teras [tidak di teras lagi ya]," kelakar Sumadi saat menjawab pertanyaan wartawan sembari tersenyum.

Terkait dengan pengegelan rumah dinas Wali Kota, menurutnya juga sudah dibuka. Hanya saja ia tidak mengetahui persis karena tidak tinggal di rumah tersebut. (JIB/Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005